

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM PENANGANAN COVID-19 DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Rifki Afrizal Saksono

NPP. 29.1100

Asdaf Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah

Program Studi Keuangan Publik

Email: rifki.afrizal18@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background(GAP): The Covid-19 pandemic that began to hit Indonesia in 2020 caused the country's economy to experience a decline. In response to this critical situation, the Indonesian government made a policy in the form of Unexpected Expenditure (BTT) funds which were used in the context of handling Covid-19. Which is divided into handling health, economic impact, and providing social safety nets. **Purpose:** The purpose of writing this thesis is to know and understand the level of effectiveness of BTT at BPKAD in Palangka Raya City. As well as knowing, understanding and explaining what problems can hinder the running of the BTT program. **Method:** Measuring the level of effectiveness of Unexpected Expenditures at BPKAD Palangka Raya, the author uses the theory of effectiveness according to Siagian as an analytical tool with descriptive qualitative research methods by conducting observations, interviews, and documentation. **Result:** From the research that the author has carried out, it shows that the implementation of BTT in the BPKAD of Palangka Raya City has been running optimally. **Conclusion:** However, in the implementation of the program there are still some problems. For this reason, it is necessary to carry out regular monitoring in the field, improve coordination with the parties involved, and take a persuasive approach to the community.

Keywords: Program effectiveness, BTT, Handling Covid-19

ABSTRAK

Persalahan/Latar Belakang (GAP) Pandemi Covid-19 yang mulai melanda Indonesia pada tahun 2020 silam membuat perekonomian negara mengalami penurunan. Menanggapi situasi genting ini, pemerintah Indonesia membuat kebijakan berupa dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang digunakan dalam rangka penanganan Covid-19. Yang terbagi dalam penanganan kesehatan, dampak ekonomi, dan penyedia jaring pengaman sosial. **Tujuan:** adapun tujuan dari penulisan Skripsi ini adalah guna mengetahui dan memahami tingkat efektivitas BTT di BPKAD di Kota Palangka Raya. Serta mengetahui, memahami dan menjelaskan apa saja permasalahan yang dapat menghambat jalannya program BTT. **Metode:** Pengukuran tingkat efektivitas Belanja Tidak Terduga di BPKAD Kota Palangka Raya, penulis menggunakan teori efektivitas menurut Siagian sebagai pisau analisis dengan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Dari penelitian yang penulis laksanakan menunjukkan bahwa pelaksanaan BTT di BPKAD Kota Palangka Raya telah berjalan dengan maksimal. Tetapi dalam pelaksanaan program masih terdapat beberapa permasalahan. **Kesimpulan:** Untuk itu perlu dilakukan monitoring di lapangan secara rutin, meningkatkan koordinasi dengan pihak yang terlibat, dan melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat.

Kata Kunci: *Efektivitas program, Belanja Tidak Terduga, Covid-19*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada awal tahun 2020 merupakan awal munculnya dari wabah pandemi Covid-19 di Negara Indonesia yang berdampak khususnya dibidang kesehatan, ekonomi, sosial dan banyak pihak lainnya, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Covid-19 merupakan bagian dari bencana nasional non-alam yang dituangkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana nonalam sebagai bencana nasional. Kondisi tersebut apabila tidak dapat diantisipasi dengan baik, maka akan terjadinya ketidakstabilan sosial. Dalam upaya pemerintah Indonesia menetapkan UU Nomor 2 Tahun 2020 Tentang kebijakan keuangan negara pada penanganan Covid-19 serta menghadapi berbagai ancaman membahayakan bagi bidang perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan. Pemerintah daerah diberi kewenangan agar dapat melaksanakan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu atau refocusing, perubahan alokasi, dan penggunaan APBD dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri. Untuk itu Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya menggunakan Dana Belanja Tidak Terduga dalam penanganan Covid-19 yang terbagi menjadi tiga komponen utama yaitu penanganan dampak kesehatan senilai Rp. 74.950.508.200 dengan realisasi (99,14%), Dampak Ekonomi senilai 5.674.678.050 dengan realisasi (100%), dan Penyedia Jaring Pengaman Sosial senilai 5.550.000.000, dengan reaisasi (100%) menurut data dari Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palangka Raya. Maka penulis ingin mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga Dalam Penanganan

Covid-19 Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palangka Raya Povinsi Kalimantan Tengah.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya telah memaksimalkan penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga dibuktikan dengan realisasi ke tiga komponen utama dalam penanganan Covid-19 yang realisasinya hampir 100% pada tahun 2020. Dana Belanja Tidak Terduga tersebut telah disalurkan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam penanganan Covid-19 di Kota Palangka Raya. Namun angka khusus Covid-19 pada tahun 2020 masih belum juga turun di Kota Palangka Raya. Kurangnya kerjasama yang kuat dari Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya dan masyarakat akan menghambat dalam penanganan Covid-19 di Kota Palangka Raya.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Yang pertama Penelitian oleh Natta Sanjaya (2020) menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif. Variabel Penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan di masa pandemi Covid-19 study kasus pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten. Dengan hasil Pemerintah Daerah Provinsi Banten telah melakukan upaya-upaya penganggaran keuangan daerah dimasa pandemi Covid-19 sesuai ketentuan yang diamanatkan oleh pemerintah pusat yaitu melalui refocusing dan realokasi anggaran untuk focus kepada bidang penanganan kesehatan, pemulihan sektor ekonomi, dan jaringan pengaman sosial. Penelitian oleh Basri, Y & Gusnardi, G. (2021) menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif. Variabel Penganggaran Pemerintah Provinsi Riau di masa pandemi Covid-19 study kasus pada Pemerintah Daerah Provinsi Riau. Dengan hasil regulasi yang minim tentang penggunaan Belanja Tidak Terduga menimbulkan permasalahan dalam pertanggung jawaban Belanja Tidak Terduga. Penelitian oleh Dani Sugiri (2020) menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif. Variabel perlakuan akuntansi bagi belanja tak terduga yang sesuai dengan standar, kebijakan dan sistem akuntansi yang berlaku pada pemerintah daerah. Dengan Hasil pencatatan akuntansi dari BTT berbeda antara BTT yang langsung menjadi beban, mengakibatkan timbulnya persediaan atau menimbulkan aset tetap.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini yaitu berfokus pada Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam penanganan Covid-19 di BPKAD Kota Palangka Raya dengan mengambil satu sampel pengguna dana BTT di BPBD Kota Palangka Raya. Penelitian ini dilakukan pada SKPD di Kota Palangka Raya yang penelitian sebelumnya belum pernah dilakukan.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Belanja Tidak Terduga dalam penanganan Covid-19 di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palangka Raya Povinsi Kalimantan Tengah, mengetahui faktor-faktor yang menghambat, serta upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan efektivitas pelaksanaan Belanja Tidak Terduga dalam penanganan Covid-19 Kota Palangka Raya.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif dan pendekatan induktif. Penulis memilih desain penelitian ini karena menganggap desain ini cocok untuk memberikan gambaran berupa data dan fakta dilapangan sehingga mampu memberi jawaban hingga mendapatkan kesimpulan dari pertanyaan mengenai penggunaan dana belanja tidak terduga dalam rangka penanganan Covid-19. Kemudian penulis menggunakan teknik analisis data dengan model interaktif yang diungkapkan oleh Miles dan Huberman. Melalui teknik analisis ini pertama-tama Penulis mengumpulkan data dari hasil wawancara dan dokumentasi yang dilaksanakan Penulis. Selanjutnya dari sekian data yang telah dikumpulkan penulis merangkum data-data tersebut dan memilih hal-hal pokok yang akan ditampilkan dalam penyajian data, yang biasa dikenal dengan reduksi data. Data yang telah direduksi oleh penulis selanjutnya disajikan dalam bentuk naratif, bentuk tabel, atau grafik jika diperlukan. Tahap akhir peneliti memverifikasi data-data yang terkumpul dari penyajian data yang ada dan selanjutnya penulis menarik kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Efektivitas Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga Dalam Penanganan Covid-19 Di Kota Palangka Raya

Berdasarkan data BPKAD Kota Palangka Raya dana Belanja Tidak Terduga dalam penanganan Covid-19 tahun anggaran 2020 sebagai berikut.

Tabel 1
Data Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Percepatan Covid-19 Tahun Anggaran 2020 di BPKAD Kota Palangka Raya

No.	OPD	Bidang Belanja			Jumlah Penggunaan BTT
		Penanganan Kesehatan	Dampak Ekonomi	Jaring Pengaman Sosial	
1	2	3	4	5	6
	Pagu Anggaran	74.950.508.200	5.674.678.050	5.550.000.000	86.175.186.250
1	BPBD	29.444.491.925		5.160.000.000	
2	DINKES	44.864.276.825			44.864.276.825
3	KEMENAG			390.000.000	390.000.000
4	Dinas Tenaga Kerja		502.175.300		502.175.300
5	Dinas Perdagangan Koperasi		821.823.000		821.823.000
6	Dinas Perikanan		704.820.750		704.820.750
7	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		3.645.859.000		3.645.859.000
	Jumlah Terealisasi	74.308.768.750	5.674.678.050	5.550.000.000	
	Total				85.533.446.800
	Sisa Anggaran	641.739.450	-	-	641.739.450

Sumber: Data Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Percepatan Covid-19 Tahun Anggaran 2020 di BPKAD Kota Palangka Raya

Melalui tabel 4.6 tersebut penulis melihat dana Belanja Tidak Terduga dalam penanganan Covid-19 Di Kota Palangka Raya di salurkan kepada 7 OPD yang membutuhkan. Dengan besar pagu anggaran bidang belanja penanganan kesehatan sebesar Rp.74.950.508.200, bidang belanja dampak ekonomi Rp.5.674.678.050, bidang belanja jaring pengaman sosial sebesar Rp.5.550.000.000. Hasil Jumlah penggunaan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.86.175.186.250. Jumlah realisasi dalam tiga bidang yaitu penanganan dampak kesehatan senilai Rp. 74.950.508.200 dengan realisasi (99,14%), Dampak Ekonomi senilai 5.674.678.050 dengan realisasi (100%), Penyedia Jaring Pengaman Sosial senilai 5.550.000.000, Dengan realisasi (100%). Dengan total penggunaan Belanja Tidak Terduga sebanyak Rp.86.175.186.250 dengan sisa anggaran sebesar Rp.641.739.450. OPD penerima terbanyak terdapat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya sebesar Rp.34.604.491.925 yang terbagi di dalam bidang penanganan kesehatan dan jaring pengaman sosial. Dan OPD dengan penerima paling sedikit yaitu Kementerian Agama Kota Palangka Raya sebesar Rp.39.000.000 yang terbagi dalam bidang jaring pengaman sosial.

Dana Belanja Tidak Terduga tersebut kemudian disalurkan ke 7 OPD yang menangani penanganan percepatan pandemi Covid-19 yang tertera pada tabel melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya sebagai Bendahara Umum Daerah. Kemudian OPD yang menerima dana Belanja Tidak Terduga tersebut diberi kewenangan dalam mempergunakan dana Belanja Tidak Terduga tersebut untuk pelayanan kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 di Kota Palangka Raya.

Penulis melakukan penelitian di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya untuk mengambil sampel sebagai salah satu OPD yang menerima Belanja Tidak Terduga untuk dipergunakan dalam pelayanan masyarakat yang terdampak bencana Pandemi Covid-19 di Kota Palangka Raya. BPBD Kota Palangka Raya merupakan OPD penerima Dana Belanja Tidak Terduga terbanyak sebesar Rp.34.604.491.925 yang terbagi di dalam bidang penanganan kesehatan dan jaring pengaman sosial. Penulis ingin mengetahui seberapa besar efektivitas dana tersebut dipergunakan dalam penanganan pandemi Covid-19 di Kota Palangka Raya. Kemudian Efektivitas Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga Dalam penanganan Covid-19 di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah akan dijabarkan menggunakan teori efektivitas oleh Siagian yang didalamnya terdapat 6 indikator yang meliputi kejelasan tujuan, perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat, tersedianya sarana dan prasarana, pelaksanaan yang efektif dan efisien, dan sistem pengawasan dan pengendalian.

Dengan hasil penelitian yang dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Pembahasan

No.	Uraian	Indikator	Hasil
1	Efektivitas	Kejelasan Tujuan	Sudah Efektif
		Perencanaan Yang Matang	Sudah Efektif
		Penyusunan Program Yang Tepat	Sudah Efektif
		Tersedianya Sarana Dan Prasarana	Belum Efektif
		Pelaksanaan Yang Efektif dan Efisien	Belum Efektif
		Sistem Pengawasan Dan Pengendalian	Sudah Efektif

Sumber: Diolah Oleh Peneliti Tahun 2022

3.2 Faktor Penghambat Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga Dalam Penanganan Covid-19 Di Kota Palangka Raya

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Penulis mengetahui bahwa dana Belanja Tidak Terduga disalurkan oleh BPKAD sebagai Bendahara Umum Daerah ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga untuk menangani Covid-19 di Kota Palangka Raya. Kemudian penulis mengambil sampel di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya dalam penelitian tentang penggunaan dana Belanja Tidak Terduga untuk mengetahui program apa saja yang dilaksanakan BPBD untuk penanganan Covid-19 di Kota Palangka Raya dan ditemukan beberapa faktor yang menghambat Penanganan Covid-19 di Kota Palangka Raya antara lain adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan sarana dan prasarana serta petugas penanganan Covid-19 dari BPBD sehingga memperlambat dalam penyelesaian program
2. Kesadaran masyarakat tentang bahaya Covid-19 dan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan masih rendah
3. Sanksi yang diberikan belum memberi efek jera bagi sebagian masyarakat
4. Dampak dari pelanggar protokol kesehatan membuat angka kasus positif Covid-19 naik

3.3 Upaya Yang Dilakukan Dalam Menangani Hambatan Yang Terjadi

Mengatasi hambatan-hambatan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penanganan Covid-19 di Kota Palangka Raya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya melakukan berbagai upaya guna menanggulangi permasalahan yang muncul yang dinilai dapat mengurangi atau menghilangkan permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya menjalin kerjasama antar instansi seperti TNI, POLRI, DISHUB, SATPOL PP, dan lainnya guna menambah personil petugas serta saling melengkapi sarana dan prasarana dalam melaksanakan program penanganan Covid-19.
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya selalu memonitoring dan melakukan pendekatan persuasif dengan masyarakat tentang bersikap patuh terhadap protokol kesehatan. Sehingga pelanggar dapat tersentuh hatinya agar tidak mengulangi kesalahannya.

3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya terus mendata kasus meninggal, positif, dan kesembuhan akibat Covid-19. Sebagai pedoman ketepatan program yang telah dilaksanakan.

3.4 Diskusi Utama Penelitian

Pelaksanaan BTT dalam penanganan Covid-19 di BPKAD Kota Palangka Raya memiliki kesamaan dengan penelitian Natta Sanjaya yang meneliti Penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan di masa pandemi Covid-19 study kasus pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten. Dengan hasil Pemerintah Daerah Provinsi Banten telah melakukan upaya-upaya penganggaran keuangan daerah dimasa pandemi Covid-19 sesuai ketentuan untuk focus kepada bidang penanganan kesehatan, pemulihan sektor ekonomi, dan jaringan pengaman sosial. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Basri, Y & Gusnardi, G.yang meneliti tentang Penganggaran Pemerintah Provinsi Riau di masa pandemi Covid-19 Dengan hasil regulasi yang minim tentang penggunaan Belanja Tidak Terduga menimbulkan permasalahan dalam pertanggung jawaban Belanja Tidak Terduga sedangkan pada Kota Palangka Raya tidak ada masalah pada regulasi.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor-faktor yang menghambat dan mendukung Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam penanganan Covid-19 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palangka Raya. Kemudian peneliti mengambil sampel di salah satu OPD penerima dana BTT Yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya. Penelitian ini menjadi hal baru karena dilakukan pada saat pelaksanaan dana BTT yang digunakan dalam penanganan bencana pandemi Covid-19 pertama kali terjadi pada tahun 2022.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam penanganan Covid-19 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah sudah efektif.
2. Kendala-kendala, masih adanya beberapa permasalahan yang menghambat pelaksanaan program di BPBD Kota Palangka Raya yaitu pada indikator pelaksanaan program yang efektif dan sarana dan prasarana.
3. Upaya yang dilakukan BPBD Kota Palangka Raya untuk mengatasi hambatan-hambatan program yang terjadi:
 - a. Upaya indikator pelaksanaan program efektif di BPBD Kota Palangka Raya
 - 1) BPBD Kota Palangka Raya seyogyanya menjalin kerjasama antar instansi terkait penanganan Covid-19 di Kota Palangka Raya seperti TNI, POLRI, DISHUB, SATPOL PP, dan lainnya guna menambah personil di lapangan.
 - 2) BPBD Kota Palangka Raya seyogyanya Memperhatikan fisik serta kesehatan pegawai dengan mengatur jam istirahat yang cukup. Dan mengatur pencapaian target kegiatan.

- b. Upaya indikator sarana dan prasarana di BPBD Kota Palangka Raya
- 1) BPBD Kota Palangka Raya seyogyanya melakukan pemeliharaan rutin sarana dan prasarana agar tidak cepat rusak
 - 2) BPBD Kota Palangka Raya seyogyanya menyewa sarana dan prasarana kepada pihak penyedia sarana dan prasarana jika terjadi kerusakan dan kekurangan sarana dan prasarana

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian ini juga hanya dilakukan pada saat anggaran Belanja Tidak Terduga Tersebut digunakan saat terjadi bencana alam dan nonalam.

Arah Masa Depan Penelitian: Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pelaksanaan Belanja Tidak Terduga di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palangka Raya.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala BPKAD Kota Palangka Raya beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat

Dr. Pramono Hariadi, S. E., M. S. 2013. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat

M. S. Wahyudi S., Hendra Kusuma. 2020. *Ekonomi Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19*. Malang: UMMPress

Patilima, Hamid. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Website resmi kemendagri. *Perubahan Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah*. Data Pertanggal 29 Agustus 2021.

Kementrian Kesehatan RI. 2020. *Profil Kesehatan Indonesia 2020*. Jakarta: Kemenkes RI. Diakses pada tanggal 01 September 2021.

Website resmi covid-19.go.id. *Regulasi Penanganan Covid-19*. Data Pertanggal 01 September 2021